

Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah

Nafiriair Yufan Madakarah¹ (nafiriair.yufan01@ui.ac.id)*

Willem A. Makaliwe² (wmakaliwe@gmail.com)

¹Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia 16424

²Lembaga Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia 16424

*Penulis Korespondensi

Artikel Masuk: 30 Mei 2023 | Artikel Diterima: 8 Juli 2023

Abstract

The implementation of fiscal decentralization in Indonesia has been running for more than 20 years. The government implemented fiscal decentralization policies in overcoming development problems. However, its implementation still raises various issues, including the high dependency of regional governments on transfer funds, while the level of corruption in regional heads is relatively high. The research aims to determine the effectiveness of fiscal decentralization policies on economic growth and income inequality using descriptive quantitative analysis, spatial, and panel data regression. Based on the analysis, 4 provinces are considered effective, 16 provinces are quite effective, and 14 provinces are less effective in implementing their fiscal decentralization policies. 20 out of 34 provinces were considered to have been implemented well, so it was concluded that fiscal decentralization policies were generally implemented relatively effectively in 34 provinces. This is evidenced by the regression analysis that balancing funds, DBH, DAU, and DAK have a positive effect on economic growth, while income inequality has a significant negative effect on decreasing the value of the Gini ratio.

Keywords: *fiscal decentralization; economic growth rate; Gini ratio*

JEL Classification: *E62; H30; H53; O23*

Abstrak

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan 20 tahun lebih. Kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan, namun penyelenggaraannya masih memunculkan berbagai isu antara lain masih tingginya ketergantungan pemda terhadap dana transfer sedangkan tingkat tindak pidana korupsi kepala daerah relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

pendapatan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, spasial, serta regresi panel data. Berdasarkan analisis terdapat 4 provinsi dinilai efektif, 16 provinsi cukup efektif, dan 14 provinsi kurang efektif implementasi kebijakan desentralisasi fiskalnya. 20 dari 34 provinsi dianggap sudah baik dalam implementasinya sehingga disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal secara umum relatif efektif implementasinya di 34 provinsi. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis regresi bahwa dana perimbangan, DBH, DAU, dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penurunan nilai rasio Gini.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal; pertumbuhan ekonomi; rasio Gini

Klasifikasi JEL: E62; H30; H53; O23

PENDAHULUAN

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan sekitar 20 tahun lebih sampai saat ini. Kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan sebagai salah satu cara pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan di Indonesia, namun kondisi yang diharapkan jauh berbeda dari kenyataannya karena kebijakan tersebut justru menimbulkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sekitar 50% APBD provinsi masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Sementara itu, ketergantungan APBD kabupaten/kota menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu lebih dari 50% (Alvaro, 2022).

Selain ketergantungan terhadap desentralisasi fiskal yang tinggi, daerah juga dihadapi dengan masih banyaknya tindak pidana korupsi di level daerah, baik dari gubernur maupun walikota/bupati. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 data menunjukkan terdapat 21 gubernur yang terjerat tindak pidana korupsi, sedangkan sampai tahun 2022 terdapat 22 gubernur yang terjerat tindak pidana korupsi dengan tambahan 1 orang pada tahun 2021. Lebih lanjut terdapat 119 bupati/walikota yang terjerat tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 sampai 2019 dan bertambah menjadi 161 sampai tahun 2022. Dari data yang didapatkan, tahun 2015 adalah tahun terbanyak gubernur yang ditetapkan tersangka korupsi sebanyak 3 orang dan tahun 2018 adalah tahun terbanyak bupati/walikota yang ditetapkan tersangka korupsi sebanyak 30 orang. Hal tersebut menjadi isu yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasi desentralisasi fiskal di setiap provinsi.

Sampai saat ini penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah masih memunculkan berbagai isu. Hal tersebut dijelaskan dalam narasi RPJMN 2020-2024 dimana isu yang muncul antara lain masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan (Arispen & Rahmi, 2021). Kementerian Keuangan mencatat secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80.1%. Sementara, kontribusi PAD hanya sekitar 12.87%. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat ke daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi dapat menurunkan efektivitas serta kontribusi pemerintah daerah dalam mengelola potensi PAD yang selanjutnya dapat berdampak pada tidak terselesaikannya permasalahan mendasar yang ada di setiap daerah maupun antardaerah terkait ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Gumelar & Khairina, 2021).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia didasarkan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin terjadi, baik antardaerah atau *horizontal imbalances* maupun antara pemerintah pusat dan daerah atau *vertical imbalances* (Sudhipongpracha & Wongpredee, 2017). Sementara itu, sasaran pembangunan kewilayahan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antardaerah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu

Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu diketahui kontribusi dan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi sekaligus melihat besaran ketimpangan pendapatan antardaerah yang dihasilkan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal namun belum menunjukkan hasil yang konklusif, sedangkan penelitian dampak desentralisasi fiskal dengan komparasi antardaerah dalam isu terkait ketimpangan wilayah belum pernah dilakukan. Berangkat dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan menggunakan analisis komparatif dampak kebijakan desentralisasi fiskal dengan studi kasus yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu komparasi antardaerah dari daerah dengan kapasitas fiskal relatif rendah sampai daerah dengan kapasitas fiskal relatif tinggi berbasis spasial.

Studi ini sebagai suatu hal yang baru untuk melihat apakah ada perbedaan dampak yang signifikan pada setiap daerah di Indonesia, yaitu semua provinsi di Indonesia pada perkembangan terkini karena belum terdapat penelitian yang serupa. Penelitian ini diharapkan juga akan berkontribusi dalam mengetahui efektivitas dan perbaikan apa yang perlu dilakukan pada daerah dengan karakteristik tertentu dalam mencapai target pembangunan yang diinginkan serta mengurangi ketergantungan transfer dari pusat ke daerah. Berdasarkan uraian penjelasan dalam latar belakang, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh dan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi serta dalam pengurangan ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Indonesia memiliki 34 provinsi yang memiliki karakter yang berbeda-beda antarprovinsi. Seluruh 34 provinsi tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan antardaerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi serta indeks Gini yang menunjukkan besaran ketimpangan pendapatan antarprovinsi yang besarnya dinilai atau dipengaruhi dengan variabel bebas, di mana dalam penelitian ini adalah dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), sedangkan terdapat variabel kontrol untuk meminimalisir bias dalam model perhitungan, yaitu persentase penduduk miskin, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, tenaga kerja formal.

Pengolahan Data dan Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Spasial

Dilakukan pengolahan data spasial dengan aplikasi ArcGIS 10.8 dan pengolahan data panel di aplikasi Stata dengan menggunakan model regresi. Dalam pengolahan data spasial dilakukan interpretasi terhadap 6 indikator dalam penelitian yang dinilai dapat menunjukkan efektivitas desentralisasi fiskal: 1.) pola pertumbuhan ekonomi dengan dana perimbangan; 2.) pola pertumbuhan rasio Gini dengan dana perimbangan; 3.) capaian indikator utama pembangunan laju

pertumbuhan ekonomi; 4.) pola pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah; 5.) pola pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa; dan 6.) pola pertumbuhan realisasi belanja modal pada tahun 2015-2019 yang akan dikelompokkan menjadi 3 kelas dengan diberikan skor pada tiap kelasnya.

Tabel 1. Perhitungan Skoring 6 Indikator dalam Penelitian

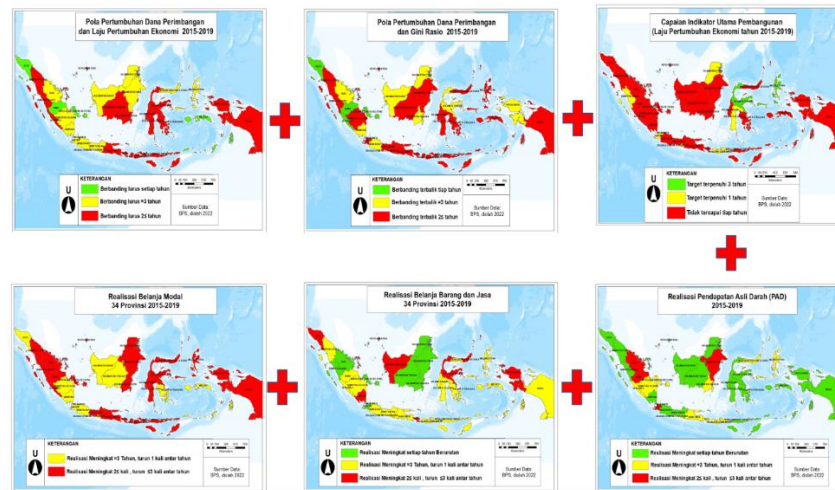
No	Indikator dalam Penelitian Skoring	Keterangan Penilaian	Keterangan Score
1	Keterangan pola pertumbuhan dana perimbangan dan laju pertumbuhan ekonomi 2015-2019	Berbanding lurus $2 \leq$ tahun	1
		Berbanding lurus = 3 tahun	2
		Berbanding lurus setiap tahun	3
2	Keterangan pola pertumbuhan dana perimbangan dan nilai rasio Gini 2015-2019	Berbanding terbalik $2 \leq$ tahun	1
		Berbanding terbalik = 3 tahun	2
		Berbanding terbalik setiap tahun	3
3	Capaian indikator utama pembangunan (laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2019)	Tidak tercapai tiap tahun	1
		Target tercapai 1 tahun	2
		Target tercapai 3 tahun	3
4, 5, 6	Keterangan pola pertumbuhan realisasi PAD, belanja barang dan jasa, belanja modal 2015-2019	Realisasi meningkat $2 \leq$ kali, turun ≤ 3 kali antar tahun	1
		Realisasi meningkat = 3 tahun, turun 1 kali antar tahun	2
		Realisasi meningkat setiap tahun berurutan	3

Lebih lanjut dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial pemetaan untuk melihat efektivitas implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan. Terdapat enam indikator yang digunakan dengan melakukan skoring dan pembobotan yang selanjutnya dilakukan *overlay* pemetaan untuk mengetahui provinsi mana saja yang dikategorikan efektif pelaksanaannya. Pada setiap indikator dibagi menjadi beberapa kelas dan dilakukan pembobotan yang besaran nilainya berdasarkan tujuan penelitian dimana nilai terbesar, yaitu pada pola kenaikan dana perimbangan terhadap kenaikan LPE serta penurunan rasio Gini. Tabel 2 menunjukkan enam indikator yang dipilih beserta nilai pembobotannya.

Tabel 2. Perhitungan Pembobotan 6 Indikator dalam Penelitian

No.	Indikator	Nilai Pembobotan
1	Pola pertumbuhan dana perimbangan terhadap kenaikan LPE	25
2	Pola pertumbuhan dana perimbangan terhadap penurunan rasio Gini	25
3	Capaian indikator pembangunan	15
4	Pola pertumbuhan realisasi belanja PAD	15
5	Pola pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa	10
6	Pola pertumbuhan realisasi belanja modal	10

Dari enam indikator dilakukan *overlay* pemetaan dengan analisis union untuk mendapatkan hasil akhir wilayah yang dianggap efektif.



Gambar 1. Overlay 6 Indikator Penilai Efektivitas Dana Perimbangan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019

Analisis *overlay* peta dilakukan pada enam indikator yang dianggap dapat menunjukkan keefektifitasan dana perimbangan dengan kriteria nilai skoring pembobotan dibagi menjadi tiga nilai, yaitu efektif, cukup efektif, dan kurang efektif yang didapatkan dari total keseluruhan nilai perhitungan dari tabel indikator penelitian skoring dikalikan dengan nilai bobot.

Pengolahan Data dan Analisis Regresi Panel Data

Pada proses pengolahan data yang pertama dilakukan proses pengolahan data perimbangan (termasuk DAU, DBH, DAK) dan data pertumbuhan ekonomi serta rasio Gini. Selanjutnya model empiris yang digunakan adalah model regresi panel data untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesenjangan pendapatan antarprovinsi dan dalam rentang waktu 2015-2019 dengan menggunakan *robustness test* dimana dapat dinyatakan secara umum dengan persamaan sebagai berikut:

$$LPE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 POV_{it} + \beta_3 POP_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 LAB_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 POV_{it} + \beta_3 POP_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 LAB_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Di mana LPR adalah laju pertumbuhan ekonomi, GR adalah rasio Gini, DP adalah dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), *POV* adalah persentase kemiskinan, *POP* adalah jumlah penduduk, *TPT* adalah tingkat pengangguran terbuka, *LAB* adalah tenaga kerja, β_0 hingga β_5 adalah intersep dan koefisien variabel, *i* adalah indeks untuk provinsi ke-*i*, *t* adalah indeks untuk tahun (2015-2019), dan μ adalah error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

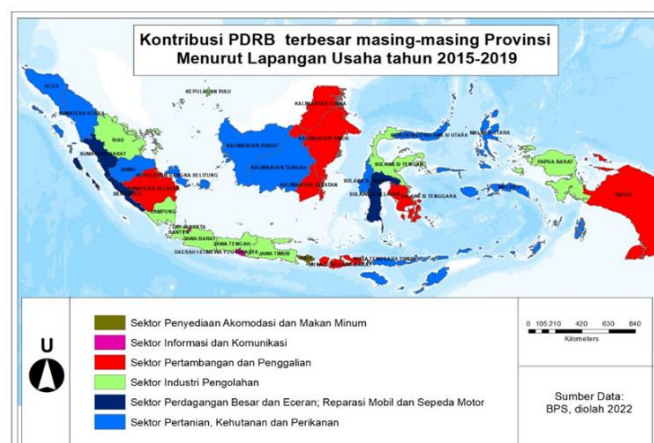
Hasil Analisis Spasial dan Deskriptif Kuantitatif

Dari hasil proses *overlay*, didapatkan provinsi yang menunjukkan efektivitas dana perimbangan baik terhadap peningkatan LPE dan penurunan rasio Gini yang di mana hanya 4 provinsi yang dinilai efektif implementasi kebijakan desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan, yaitu Provinsi Aceh, Jambi, Bangka Belitung, serta Kalimantan Utara, sedangkan terdapat 16 provinsi yang dinilai cukup efektif dan 14 provinsi yang dinilai kurang efektif. Dari analisis spasial didapatkan rata-rata provinsi yang dianggap efektif berada pada wilayah barat Indonesia sedangkan wilayah timur Indonesia rata rata masih kurang efektif.



Gambar 2. *Overlay* Efektivitas Dana Perimbangan terhadap LPE dan Rasio Gini 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019

Dari hasil analisis spasial dan deskriptif kuantitatif dapat dihasilkan hipotesis awal bahwa secara keseluruhan efektivitas dana perimbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di 34 provinsi terbilang sudah relatif efektif di sebagian besar provinsi dengan catatan perlu peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana perimbangan agar lebih maksimal implementasinya khususnya pada provinsi yang dinilai masih kurang efektif.



Gambar 3. Kontribusi PDRB Terbesar Menurut Lapangan Usaha 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019

Dari provinsi yang dianggap efektif implementasi kebijakan desentralisasi fiskalnya pada gambar 2 dan dikomparasi dengan peta gambar 3 terkait kontribusi PDRB terbesar masing-masing provinsi menurut lapangan usaha maka dapat diketahui bahwa provinsi yang dianggap efektif dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, baik Provinsi Aceh, Jambi, maupun Bangka Belitung, memiliki kontribusi PDRB terbesar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara pada sektor pertambangan dan penggalian.

Untuk menguji hasil hipotesis yang menyatakan dana perimbangan dinilai relatif efektif di sebagian besar provinsi di Indonesia maka akan dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam validasi hipotesis awal yang dihasilkan terkait efektivitas dana perimbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan rasio Gini 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.

Analisis Kuantitatif (Regresi Data Panel Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi)

Tabel 3. Tabel Estimasi Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* 34 Provinsi (Regresi Data Panel Pengaruh DBH, DAU, DAK, Dana Perimbangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi)

Variabel	1	2	3	4	5
	LPE	LPE	LPE	LPE	LPE
DBH	-1.06	-3.18	-4.10	1.13	1.87
Penduduk Miskin		0.639	0.653	0.659	0.721
Jumlah Penduduk			0.678	4.162	2.919
TPT				0.282	0.291
Tenaga Kerja					0.0693
DAU	-0.28	1.859	2.451	2.874	3.147*
Penduduk Miskin		1.089*	0.885	0.936	1.076*
Jumlah Penduduk			-15.47	-11.52	-14.85
TPT				0.499	0.532
Tenaga Kerja					0.126
DAK	-0.135	0.14	0.187	0.228	0.24
Penduduk Miskin		0.825*	0.718	0.74	0.821
Jumlah Penduduk			-7.181	-3.775	-5.45
TPT				0.366	0.379
Tenaga Kerja					0.0847
Dana Perimbangan	-0.557	0.438	0.419	0.626	0.657
Penduduk Miskin		0.816	0.826	0.882	0.957
Jumlah Penduduk			0.762	3.367	2.111
TPT				0.31	0.322
Tenaga Kerja					0.0734

Analisis regresi menghitung masing-masing komponen dari dana perimbangan, yaitu DBH, DAU, dan DAK maupun secara total dalam dana perimbangan, terhadap LPE dengan variabel kontrol yang sama untuk melihat variasi yang dihasilkan bila masing-masing komponen dana perimbangan diperhitungkan. Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan estimasi regresi data panel menggunakan *fixed effect model* untuk mengetahui pengaruh DBH, DAU, DAK, serta dana perimbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Perhitungan

menggunakan *robustness test* standar untuk mengetahui konsistensi koefisien serta proses koreksi bias. Hasil yang akan digunakan adalah pada persamaan 5 di mana dari hasil tabel menunjukkan bahwa baik DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara umum di seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2019. Dari hasil hanya DAU yang menunjukkan signifikansi dalam perhitungan. Hal tersebut dapat diperkirakan karena pengaruh ketersediaan data yang belum dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari DBH, DAU, dan dana perimbangan.

Dari nilai tersebut karena memakai bentuk fungsi linier-log maka menunjukkan bahwa pada DBH, setiap kenaikan 1% DBH akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1.87/100 atau 0.0187 satuan. Pada DAU, setiap kenaikan 1% DAU akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3.147/100 atau 0.03147 satuan. Pada DAK, setiap kenaikan 1% dana perimbangan akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0.24/100 atau 0.0024 satuan, sedangkan pada dana perimbangan, setiap kenaikan 1% dana perimbangan akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0.657/100 atau 0.00657 satuan. Dari hasil perhitungan yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan terhadap LPE, walaupun nilainya hanya DAU yang menunjukkan signifikansi, hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial yang menunjukkan secara keseluruhan implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan berjalan relatif cukup efektif.

Dari hasil estimasi model regresi yang menunjukkan dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif namun hanya pada DAU yang terdapat signifikansi menunjukkan perlu adanya penguatan pemerintah daerah dalam mengelola dana perimbangan dengan bijak, khususnya karena adanya beberapa tindak pidana korupsi yang marak terjadi pada tahun penelitian. Data menunjukkan terdapat gubernur dan wali kota/bupati yang terjerat korupsi oleh KPK tahun 2004-2022 dimana pada tahun 2015-2019 adalah rentang tahun yang paling banyak terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari KPK, sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 data menunjukkan terdapat 21 gubernur yang terjerat tindak pidana korupsi, sedangkan sampai tahun 2022 terdapat 22 gubernur yang terjerat tindak pidana korupsi dengan tambahan 1 orang pada tahun 2021. Lebih lanjut terdapat 119 bupati/walikota yang terjerat tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 sampai 2019 dan bertambah menjadi 161 sampai tahun 2022. Dari data yang didapatkan, tahun 2015 adalah tahun terbanyak gubernur yang ditetapkan tersangka korupsi sebanyak 3 orang dan tahun 2018 adalah tahun terbanyak bupati/walikota yang ditetapkan tersangka korupsi sebanyak 30 orang. Hal tersebut menjadi isu yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasi desentralisasi fiskal di setiap provinsi khususnya untuk laju pertumbuhan ekonomi.

Analisis Kuantitatif (Regresi Data Panel Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Rasio Gini)

Analisis regresi yang menghitung masing masing komponen dari dana perimbangan, yaitu DBH, DAU, dan DAK maupun secara total dalam dana perimbangan terhadap rasio Gini dengan variabel kontrol yang sama untuk melihat

variasi yang dihasilkan jika masing masing komponen dana perimbangan diperhitungkan. Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan estimasi regresi data panel menggunakan *random effect model* untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap rasio Gini.

Tabel 4. Perhitungan Tabel Estimasi Regresi Data Panel *Random Effect Model* 34 Provinsi (Regresi Data Panel Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Rasio Gini)

Variabel	1	2	3	4	5
	GR	GR	GR	GR	GR
DBH	-0.00475	-0.00278	-0.00491	-0.00505	-0.00585*
Penduduk Miskin		0.00285***	0.00304***	0.00309***	0.00400***
Jumlah Penduduk			0.0145*	0.0148*	0.0157**
TPT				-0.000736	-0.00107
Tenaga Kerja					0.000851*
DAU	-0.00717*	-0.00403	-0.00523	-0.00802*	-0.00824*
Penduduk Miskin		0.00301***	0.00314***	0.00315***	0.00361***
Jumlah Penduduk			0.0112*	0.0126*	0.0130*
TPT				-0.00276	-0.0029
Tenaga Kerja					0.000413
DAK	-0.00200*	-0.00113	-0.00135	-0.00181*	-0.00187*
Penduduk Miskin		0.00255**	0.00278***	0.00276***	0.00341***
Jumlah Penduduk			-0.0122*	0.0132*	0.0135**
TPT				-0.00231	-0.00252
Tenaga Kerja					0.000586
Dana Perimbangan	-0.00734**	-0.0044	-0.00604*	-0.00758**	-0.00816**
Penduduk Miskin		0.00241**	0.00257**	0.00249**	0.00335***
Jumlah Penduduk			0.0141*	0.0154**	0.0160**
TPT				-0.00192	-0.00228
Tenaga Kerja					0.000736

Perhitungan menggunakan *robustness test* standar untuk mengetahui konsistensi koefisien serta proses koreksi bias. Hasil yang akan digunakan adalah pada persamaan 5 dimana dari hasil tabel menunjukkan bahwa, baik DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang negatif terhadap rasio Gini secara umum di seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2019 yang menunjukkan signifikansi dalam semua perhitungan. Dari nilai tersebut karena memakai bentuk fungsi linier-log maka menunjukkan bahwa pada DBH, setiap kenaikan 1% DBH akan menurunkan rasio Gini sebesar 0.00585/100 atau 0.0000585 satuan. Pada DAU, setiap kenaikan 1% DAU akan menurunkan rasio Gini sebesar 0.00824/100 atau 0.0000824 satuan. Pada DAK, setiap kenaikan 1% DAK akan menurunkan rasio Gini sebesar 0.00187/100 atau 0.0000187 satuan, sedangkan pada dana perimbangan, setiap kenaikan 1% dana perimbangan akan menurunkan rasio Gini sebesar 0.00816/100 atau 0.0000816 satuan. Dari hasil perhitungan yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dari DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan terhadap rasio Gini yang menunjukkan signifikansi. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial yang menunjukkan secara keseluruhan implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan berjalan relatif efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis deskriptif kuantitatif dan *overlay* pemetaan didapatkan bahwa terdapat 4 provinsi yang dinilai efektif implementasi kebijakan desentralisasi fiskalnya dengan dana perimbangan terhadap pertumbuhan LPE maupun penurunan nilai rasio Gini, sedangkan terdapat 16 provinsi yang dinilai cukup efektif dan 14 provinsi yang dinilai kurang efektif kebijakan desentralisasi fiskalnya melalui dana perimbangan. Secara keseluruhan, 20 dari 34 provinsi dianggap sudah baik dalam implementasi desentralisasi fiskal sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal secara umum relatif efektif implementasinya di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan analisis regresi yang menunjukkan bahwa baik DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara umum di seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2019, walaupun dari hasil hanya DAU yang menunjukkan signifikansi dalam perhitungan. Hal tersebut dapat diperkirakan karena pengaruh ketersediaan data yang belum dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari DBH, DAU, dan dana perimbangan. Lebih lanjut, pembuktian hasil analisis dikuatkan dari hasil perhitungan regresi yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dari DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan terhadap rasio Gini yang menunjukkan signifikansi. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial yang menunjukkan secara keseluruhan implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan berjalan relatif efektif implementasinya.

Dari hasil disimpulkan bahwa perbedaan karakteristik provinsi baik dari sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB serta pengaruh sosial ekonomi serta kualitas SDM dan pengelolaan keuangan daerah terkait pendapatan asli daerah, belanja modal, belanja barang dan jasa dapat mempengaruhi keefektifan kebijakan desentralisasi fiskal di setiap provinsinya. 4 provinsi yang dinilai paling efektif, yaitu Provinsi Aceh, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Utara. Sebanyak 3 dari 4 provinsi tersebut didapatkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB masing-masing provinsi, yaitu pada Provinsi Aceh, Jambi, dan Bangka Belitung, sedangkan 1 provinsi sisanya, yaitu Kalimantan Utara dimana sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB provinsi. Perbedaan sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar tersebut dapat menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan yang relevan yang perlu diterapkan di masing masing provinsi tersebut agar implementasi desentralisasi fiskal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing provinsi dalam pengembangan masing-masing daerah.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan analisis terkait pengaruh desentralisasi fiskal pada ketimpangan antar wilayah karena dalam penelitian ini terbatas hanya pada analisis ketimpangan pendapatan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan survey langsung di lapangan untuk melihat kualitas dari implementasi desentralisasi fiskal dilihat dari kualitas

layanan yang disediakan pemerintah serta dapat menambahkan analisis terkait adanya pengaruh karakteristik kepala daerah dengan variabel-variabel sosial ekonomi lainnya untuk mengetahui dampak dan pengaruh dari karakteristik pengambil kebijakan di daerah dalam mencapai *good governance* untuk terwujudnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang efektif pada seluruh provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, R. (2022). Gambaran Kemampuan Keuangan Provinsi Di Wilayah Barat Indonesia Dan Kebijakan Pada Transfer Ke Daerah Tahun 2010-2020. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1), 56–75.
- Arispen, A., & Rahmi, D. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342–364. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231>
- Sudhipongpracha, T., & Wongpredee, A. (2017). Fiscal Decentralization in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia and Thailand. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 19(3), 245–261. <https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1138659>